

## EVALUASI AKSESIBILITAS WEBSITE COVID19.KALTIMPROV.GO.ID MENGUNAKAN SORTSITE 5.3.5

Bambang Irawan<sup>1</sup>, Muhammad Nizar Hidayat<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Magister Administrasi Publik (Universitas Mulawarman)

<sup>2</sup>Program Ilmu Komunikasi (Universitas Lambung Mangkurat)

Alamat Korespondensi : bambangirawan@unmul.ac.id

**Abstract:** This article aims to evaluate the accessibility of a government website, covid19.kaltimprov.go.id which created for disseminating the official information regarding the spread of covid-19 in East Kalimantan. Accessibility is an important aspect of a website because it indicates how far the range of information dissemination of such website. In this article we use SortSite 5.3.5, an online website testing software. The result shows that accessibility of covid19.kaltimprov.go.id still score below average with so many pages with accessibility issues. It is therefore need attention from East Kalimantan government to improve the accessibility level of their website.

**Keywords:** Accessibility, Website, Covid-19, East Kalimantan

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aksesibilitas website covid19.kaltimprov.go.id sebagai kanal resmi penyebaran informasi terkait pandemi covid-19 di Kalimantan Timur. Aksesibilitas merupakan hal penting yang mempengaruhi daya jangkauan informasi yang ada pada suatu website. Metode evaluasi aksesibilitas menggunakan aplikasi SortSite 5.3.5 suatu aplikasi pengujian website yang berbasis online. Hasil evaluasi menunjukkan data bahwa permasalahan aksesibilitas pada website covid19.kaltimprov.go.id masih menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kalimantan Timur.

**Kata Kunci :** Aksesibilitas, Website, Covid-19, Kalimantan Timur

### Pendahuluan

Abad 21 menjadi era dimana proses digitalisasi menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi yang masif dan revolusioner dalam beberapa dekade terakhir. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang kehidupan manusia dianggap sebagai suatu tonggak yang berperan penting pada kehidupan masyarakat modern. Salah satu contoh pemanfaatan teknologi ini adalah *electronic government* atau *e-government*. Asumsi dasar yang melandasi penerapan *e-government* adalah keterhubungan yang linear antara aplikasi *e-government* dan kualitas tata pemerintahan. *E-government* dianggap bisa menjadi katalisator dari demokratisasi proses pemerintahan yang menekankan pada prinsip keterbukaan dan akuntabilitas selain pada peluang untuk memperbesar jangkauan pelayanan publik. Inklusifitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah ini menjadi tolak ukur dari penerapan Tata Pemerintahan yang baik atau *Good Governance* dan *e-government* dianggap sebagai medium yang sangat potensial dalam mewujudkan tujuan tersebut (United Nations, 2008).

Dengan potensi yang melekat pada *e-government*, maka tidak mengherankan apabila topik kajian mengenai *e-government* menjadi agenda riset yang penting dalam disiplin ilmu pemerintahan, politik dan administrasi publik. Tema besar mengenai *e-government* dikaji lebih dalam sehingga menghasilkan sub-

tema yang memiliki penekanan tersendiri mulai dari faktor penentu keberhasilan penerapannya, pembahasan dan diskusi mengenai konsep-konsep dasar dan teori yang menjelaskan *e-government* sampai pada perbandingan penerapan atau *benchmarking* dari berbagai negara di dunia baik pada negara berkembang maupun negara maju (Aladwani, 2016; Choi, Park, Rho, & Zo, 2014; Elkadi, 2013; Guijarro, 2007; Schuppan, 2009; Veeramootoo, Nunkoo, & Dwivedi, 2018).

Karena sifat dasar dari *e-government* yang bergantung penuh pada penggunaan teknologi internet, maka salah satu sub tema yang berkembang dalam kajian *e-government* adalah kajian mengenai situs atau website resmi pemerintah. Hal ini didasari oleh perkembangan teknologi serta perkembangan sosial-ekonomi masyarakat modern yang memaksa suatu pemerintah untuk bisa adaptif dan inovatif dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang mereka emban. Adanya suatu website resmi dari pemerintah akan mendukung proses pemerintahan yang dijalankan terutama terkait dengan keterbukaan informasi serta komunikasi yang transparan antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu fokus penting dalam kajian mengenai website resmi pemerintah terletak pada kajian evaluasi. Evaluasi dari website resmi pemerintah ditujukan untuk menilai apakah website tersebut mampu mendukung tujuan-tujuan dari suatu pemerintahan tersebut serta apakah website tersebut bisa mendukung terwujudnya *Good Governance*.

Para penstudi *e-government* menggunakan berbagai macam matriks serta model evaluasi untuk menilai serta membandingkan kualitas website pemerintah baik pada level nasional maupun lokal (Holzer & Manoharan, 2016; Karkin & Janssen, 2014). Model dan matriks yang dikembangkan bermacam-macam sesuai dengan fokus dari masing-masing penstrudi, begitu pula dengan indikator-indikator yang termuat dalam model/matriks tersebut.

Selain menekankan pada aspek teknis dari penerapannya, hal yang tidak kalah penting dalam kajian *e-government* adalah aspek hubungan antara tekonogi dan manusia sebagai pengguna teknologi (*user*) yang dalam hal ini adalah ketergunaan website pemerintah dalam pelayanan publik. Penekanan pada aspek manusia ini menjadi penting karena sejatinya perkembangan teknologi ditujukan untuk memudahkan urusan manusia, bahkan dalam beberapa kasus hubungan teknologi-manusia ini menjadi lebih vital ketimbang aspek teknis. Kecanggihan teknologi informasi pada beberapa kasus tidak menjamin tingginya ketergunaan dari teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali faktor yang melandasi *gap* antara kecanggihan teknologi informasi dan rendahnya ketergunaan teknologi yang berasal dari aspek teknis dan dari *users*.

Terlebih jika dikaitkan dengan kondisi saat ini dimana sejak tahun 2019, dunia dikejutkan dengan pandemi Covid-19 yang berdampak besar pada kehidupan manusia. Pandemi Covid-19 ini merupakan pandemi global pertama yang terjadi di era digital. Oleh sebab itu penggunaan teknologi informasi dalam mengurangi dampak negatif covid menjadi topik yang sangat relevan dalam kajian administrasi publik kontemporer. Ini tidak terlepas dari dampak sosial yang ditimbulkan oleh covid-19, dampak negatif ini berbentuk misinformasi yang parah dan destruktif yang meresahkan masyarakat. Informasi palsu sangat mudah menyebar melalui media

sosial dan menyebabkan kepanikan, depresi dan dampak negative lain yang bisa membuat penanganan covid-19 oleh pemerintah menjadi terhambat.

Untuk itu penyampaian informasi yang akurat dan penangkalan informasi palsu juga menjadi agenda penting pemerintah. Dalam lingkup Kalimantan Timur, pemerintah provinsi telah menyediakan satu website resmi yang berisikan informasi-informasi resmi terkait covid-19 yakni [covid19.kaltimprov.go.id](http://covid19.kaltimprov.go.id). Diharapkan dengan adanya website tersebut bisa menjadi rujukan utama bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi terkait covid-19 dan penanganannya di Kalimantan Timur. Namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya banyak aspek yang mempengaruhi ketergunaan teknologi informasi dalam hal ini ketergunaan website. Salah satunya adalah aspek aksesibilitas. Secara singkat, aksesibilitas merujuk pada keterjangkauan website oleh user yang dinilai dari kemudahan akses pada informasi yang terkandung pada website tersebut. Oleh sebab itu, artikel ini bertujuan untuk menguji aspek aksesibilitas website [covid19.kaltimprov.go.id](http://covid19.kaltimprov.go.id) sebagai kanal resmi penyebaran informasi terkait covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur.

## Kerangka Teori

### Website

Pada dasarnya website merupakan halaman yang berisikan informasi yang disajikan secara online atau daring melalui jaringan internet. Isi informasi di dalam suatu website biasa disebut dengan konten. Konten website bisa berupa teks, gambar, suara, *moving picture* dan media audio visual digital lainnya. website berperan besar dalam diseminasi informasi dan tersedia kapanpun sehingga website merupakan instrument yang sangat signifikan dalam komunikasi publik, bisnis digital dan urusan-urusan pemerintahan. Jika dibandingkan dengan media lainnya seperti televisi, radio, Koran atau majalah, website merupakan media diseminasi informasi yang paling mudah dan murah, mudah dioperasikan dan daya jangkauannya luas.

Sebagai media komunikasi, komponen dasar dari suatu website antara lain:

- *Networks* : jaringan yang menghubungkan komputer yang ada di seluruh dunia hingga membentuk internet
- *Clients* : *browser* atau penjelajah yang memungkinkan pengguna untuk mengakses website
- *Servers* : program yang berjalan untuk menyuplai informasi ke website
- *Documents* : halaman website yang decoding dalam bentuk HTML
- *Protocols* : *Hyper Text Transfer Protocol* (HTTP) yang oleh website clients dan servers digunakan untuk berhubungan antar satu sama lain.

### Evaluasi Website

Kajian mengenai evaluasi website menjadi salah satu kajian yang berkembang pesat dalam disiplin Administrasi Publik pada dekade terakhir. Hal ini tidak terlepas dari masifnya penggunaan teknologi informasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu bentuknya adalah masifnya pembentukan website resmi pemerintah. Evaluasi website dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang telah dirumuskan dan disesuaikan dengan dimensi teknologi dan manusia. Kajian literatur menunjukkan bahwa model evaluasi website telah dikembangkan dengan berbagai bentuk dan aplikasinya oleh para penstudi terdahulu. Seperti yang disampaikan oleh (Karkin & Janssen, 2014) yang mengidentifikasi enam indikator yang umum terdapat pada berbagai model evaluasi website yang telah disusun oleh penstudi sebelumnya. Indikator tersebut antara lain: konten, *privacy/keamanan*, *usability*, *quality*, *accessibility* dan *citizen engagement* (partisipasi publik). Untuk lebih jelasnya enam indikator evaluasi website yang umum digunakan bisa dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1. Enam Indikator Evaluasi Website Menurut (Karkin & Janssen, 2014)**

No	Indikator	Keterangan
1	Konten	Segala informasi yang disediakan di dalam website
2	Keamanan	Perlindungan identitas dan transaksi online
3	<i>Usability</i>	Kemudahan penggunaan website
4	<i>Quality</i>	Segala atribut yang harus dimiliki website
5	Aksesibilitas	Keterjangkauan website oleh pengguna
6	Partisipasi Masyarakat	Penyediaan tools yang mengumpulkan input dari pengguna

### **Aksesibilitas**

Salah satu indikator dalam evaluasi website adalah aksesibilitas. Aksesibilitas secara sederhana merujuk pada keterjangkauan website oleh pengguna. Aksesibilitas menjadi sangat penting khususnya bagi website pemerintah karena website pemerintah dibuat dan didanai oleh publik, sehingga konsekuensinya adalah website tersebut harus bisa diakses oleh semua orang. Tujuan utama dari aksesibilitas website (*website accessibility*) adalah untuk memastikan bahwa halaman-halaman pada suatu website bisa dengan mudah untuk dinavigasikan dan dibaca terlepas dari berbagai kondisi pengguna (sebagai contoh difabel, orang tua, dan kondisi lainnya yang bisa menyulitkan untuk mengakses website biasa) (Ismail & Kuppusamy, 2019). *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG) adalah panduan yang menggariskan standar yang dibuat oleh *World Wide Web Consortium* (W3C) dibawah mandat *Web Accesibility Initiative* (WAI) sejak 1999. Mengacu pada standar yang ditetapkan dalam WCAG, website dituntut untuk memenuhi beberapa fitur dasar. Hal ini termasuk menyediakan alternatif teks bagi konten non-teks, penyediaan alternatif untuk media, berbagai cara presentasi konten, serta teks konten yang harus mudah dimengerti, *predictable*, dan kompatibel (Kesswani & Kumar, 2016). Alat ukur yang digunakan adalah panduan yang digariskan oleh *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG), suatu panduan yang menetapkan standar yang dibuat oleh *World Wide Web Consortium* (W3C) dibawah mandat *Web Accesibility Initiative* (WAI) sejak 1999.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang mencoba untuk menggambarkan fenomena yang diteliti melalui narasi dan data-data numerik yang

bersifat deskriptif (Moleong, 2013). Sumber data yang digunakan adalah website covid19.kaltimprov.go.id. Untuk mengevaluasi website, digunakan alat pengujian otomatis yakni aplikasi SortSite 5.3.5. yang berbasis *online*. Dari keempat indikator yang diuji oleh SortSite 5.3.5, yang ditekankan adalah hasil pengujian terhadap indikator aksesibilitas.

## Hasil dan Pembahasan

### Website covid19.kaltimprov.go.id

Ketika wabah covid-19 merebak di Indonesia maka kebutuhan akan informasi yang akurat mengenai penyakit ini menjadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Informasi yang dicari tentu saja berpusat pada diskripsi penyakit ini, ciri-ciri penderita, cara penyebarannya dan cara pencegahannya. Selain itu informasi penting lainnya yang terkait dengan perkembangan penyebaran penyakit ini juga menjadi konsumsi publik luas seperti daerah mana saja yang memiliki tingkat penyebaran tinggi, berapa orang yang terinfeksi, berapa orang yang sembuh dan berapa orang yang meninggal.

Dengan penyebarannya yang begitu cepat, maka pada awalnya informasi-informasi tersebut berseliweran di media social namun tingkat akurasi dari informasi tersebut sangat diragukan, bahkan tidak jarang informasi tersebut adalah informasi palsu. Untuk itu maka pemerintah berinisiatif untuk membentuk suatu website resmi yang berisikan data-data dan informasi resmi terkait covid-19. Salah satu daerah yang memiliki website resmi terkait pandemi ini adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan website covid19.kaltimprov.go.id. dalam website tersebut dimuat informasi tentang data-data jumlah penduduk yang terinfeksi, jumlah suspek dan jumlah kasus meninggal. Selain itu website juga menyediakan berita-berita terkait penanganan covid-19 di Kaltim dan nasional. Begitupula dengan informasi bantuan pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan disediakan dalam website.



Gambar 1. Halaman Muka website covid19.kaltimprov.go.id

Dalam website tersebut juga ditampilkan nomor kontak penting yang bisa dihubungi oleh masyarakat apabila mereka mengalami gejala-gejala penularan covid-19. Oleh sebab itu penting sekali bagi website ini untuk bisa dijangkau oleh sebanyak banyaknya penduduk Kalimantan Timur, dan dengan demikian aspek

aksesibilitas website ini menjadi sangat vital bagi keberhasilan pengendalian covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur.

### **Hasil Evaluasi Aksesibilitas covid19.kaltimprov.go.id**

Indikator aksesibilitas berpusat pada aspek keterjangkauan website oleh pengguna atau masyarakat luas. Permasalahan akses terhadap website menjadi penting terutama bagi sebagian pengguna yang membutuhkan *treatment* yang berbeda. Misalnya seperti orang-orang tua yang tidak lagi memiliki pandangan yang jelas serta kemampuan membaca yang semakin menurun atau dengan masyarakat dengan kebutuhan khusus yang memang tidak bisa mengakses konten-konten biasa seperti teks. Hal-hal itu menyebabkan rendahnya aksesibilitas suatu website.

Selain itu aksesibilitas juga dipengaruhi oleh kualitas website itu sendiri, misalnya penggunaan ukuran teks yang terlalu besar atau terlalu kecil, kontras antara warna teks dan latar website, gambar yang ukurannya tidak proporsional, letak gambar yang menghalangi teks dan lain-lain. Kualitas website yang baik diharapkan bisa meningkatkan aksesibilitas, untuk itu dibuatlah suatu panduan yang mencoba untuk membantu pembuat website di seluruh dunia untuk bisa mendesain website agar aksesibilitasnya tinggi.

Untuk itulah dibuat suatu panduan yang bernama *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG). WCAG adalah panduan yang menggariskan standar yang dibuat oleh *World Wide Web Consortium* (W3C) dibawah mandat *Web Accesibility Initiative* (WAI) sejak 1999. Mengacu pada standar yang ditetapkan dalam WCAG, website dituntut untuk memenuhi beberapa fitur dasar. Hal ini termasuk menyediakan alternatif teks bagi konten non-teks, penyediaan alternatif untuk media, berbagai cara presentasi konten, serta teks konten yang harus mudah dimengerti, *predictable*, dan kompatibel (Kesswani & Kumar, 2016). Alat ukur yang digunakan adalah panduan yang digariskan oleh *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG), suatu panduan yang menetapkan standar yang dibuat oleh *World Wide Web Consortium* (W3C) dibawah mandat *Web Accesibility Initiative* (WAI) sejak 1999.

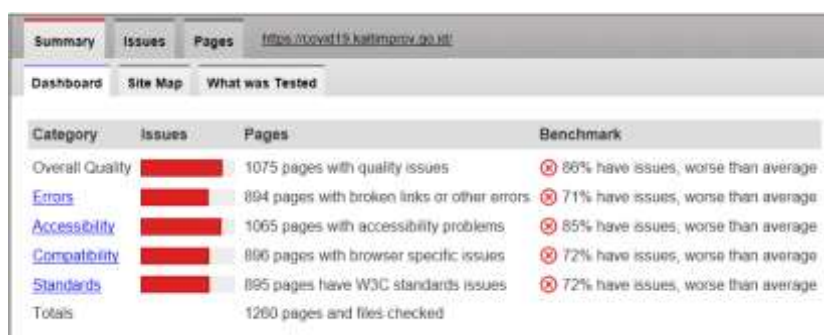
Idealnya pengujian tingkat aksesibilitas website tidak hanya mengandalkan alat uji otomatis, namun juga dibarengi dengan pengujian manual dengan meminta umpan balik dari pengguna. Misalnya meminta beberapa pengguna untuk mengakses suatu website lalu kemudian menghitung berapa waktu yang mereka butuhkan untuk mengakses informasi dalam website. Setelah itu pengguna diminta untuk mengisi kuisioner yang berisikan pertanyaan mengenai keterjangkauan website tersebut.

Namun dalam beberapa kasus pengujian otomatis sudah cukup membantu untuk mengetahui tingkatan aksesibilitas website setidaknya pada tahapan awal. Pada penelitian ini pengujian website covid19.kaltimprov.go.id dilakukan dengan menggunakan aplikasi SortSite 5.3.5. Dalam aplikasi SortSite 5.3.5, pengujian aksesibilitas didasarkan pada *the Rehabilitation Act of 1973*, peraturan pemerintah Federal Amerika Serikat yang mengatur terkait pelarangan diskriminasi pelayanan publik oleh pemerintah federal. Inti dari peraturan tersebut adalah hak bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang sama (*equal*). Ketika diaplikasikan pada aspek aksesibilitas website pemerintah, maka website pemerintah dituntut

untuk menyediakan informasi yang *accessible* bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, dan ini termasuk bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Secara spesifik *section 508* dalam *the Rehabilitation Act* yang telah diamandemen pada tahun 2017 mewajibkan kantor-kantor Federal Amerika Serikat untuk menyediakan aksesibilitas yang tinggi terhadap informasi yang mereka miliki baik kepada publik maupun pegawai Federal yang memiliki kebutuhan khusus. Langkah Amerika Serikat ini kemudian diikuti oleh pihak-pihak lain seperti perusahaan swasta. Selain itu *the Rehabilitation Act* menjadi semacam acuan bagi pengukuran aksesibilitas website terlebih bagi mereka yang berkebutuhan khusus, sehingga tidak mengherankan ketika evaluasi yang dilakukan oleh SortSite 5.3.5 turut memasukkan kriteria yang terkandung dalam *Section 508*.

Pada tahun 2017, *Section 508* diperbaharui terutama tentang persyaratan teknis kualitas standar yang wajib dipatuhi oleh satu website. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskannya dengan panduan yang dikeluarkan oleh *Web Content Accessibility Guidelines 2.0* atau WCAG 2.0. panduan WCAG 2.0 sendiri merupakan satu set rekomendasi yang diharapkan bisa membantu pembuat website untuk mendesain konten website mereka menjadi lebih *accessible* misalnya bagi mereka yang kehilangan penglihatan, atau pandangan yang kabur, permasalahan pendengaran, kesulitan dalam memahami visual, keterbatasan kognitif, keterbatasan gerakan, bisu dan lain-lain. Diharapkan ketika pembuat website mengikuti panduan WCAG 2.0 maka konten website akan lebih mudah untuk diakses oleh orang-orang semacam tadi. (W3C, 2008).



Gambar 2. Hasil Evaluasi Website covid19.kaltimprov.go.id

Setelah dilakukan evaluasi secara otomatis melalui SortSite 5.3.5, diperoleh data bahwa aksesibilitas covid19.kaltimprov.go.id memiliki 85% permasalahan dan termasuk dalam kategori *worse than average* atau lebih buruk daripada rata-rata aksesibilitas website lainnya berdasarkan *benchmarking*. Selain itu dari hasil evaluasi tersebut bisa dilihat pula bahwa indikator aksesibilitas merupakan yang terendah dari empat indikator lainnya yang diuji melalui SortSite.

Secara lebih detail, pengujian indikator aksesibilitas menggunakan tiga tingkatan penilaian: level A, AA dan AAA. Level A adalah level yang mengindikasikan bahwa konten yang terdapat pada website tidak bisa diakses sama sekali oleh beberapa orang tertentu dan merupakan level terparah. Level AA adalah level tengah dimana sebagian informasi pada website sangat sulit untuk dimengerti dan halaman website sulit untuk digunakan. Dan terakhir level AAA yang

mengindikasikan bahwa konten yang terkandung dalam website boleh jadi atau berpotensi untuk sulit digunakan dan dimengerti oleh pengguna. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 2 rincian dari permasalahan yang terdapat pada website covid19.kaltimprov.go.id beserta level permasalahan dan jumlah halamannya.

**Tabel 2. Permasalahan Aksesibiiltas pada website covid19.kaltimprov.go.id**

Level	Issues	Jumlah Halaman
A	alt text should not be an image file name.	117
A	Content inserted with CSS is not read by some screen readers, and not available to people who turn off style sheets.	2
A	Document title must not be blank.	122
A	Duplicate attribute href.	1
A	Duplicate id - the same ID is used on more than one element.	8
A	Each a element must contain text or an img with an alt attribute	2
A	Element ol not allowed as child element in this context	1
A	Element style not allowed as child element in this context.	6
A	Figures and images in PDF documents should have non blank ALT text, except for decorative images which should be marked as artifacts.	125
A	Identify row and column headers in data tables using th elements, and mark layout tables with role=presentation.	1
A	iframe and frame elements must have title attributes	2
A	img elements must have an alt attribute.	9
A	Inserting spaces between letters in a word means screen readers cannot pronounce the words correctly.	4
A	No space between attributes.	2
A	object elements should contain alternative content.	1
A	PDFs must be tagged to be accessible by screen readers.	7
A	Quote " in attribute name. Probable cause: Matching quote missing somewhere earlier.	1
A	Removing the underline from links makes it hard for color-blind users to see them.	1
A	Some pages have the same title, so the title cannot be used to distinguish pages	875
A	Sray end tag div.	886
A	Stray end tag section.	1
A	This form control has a blank label or title.	2
A	This form control has no label and no programmatically determined name.	2
A	Use the lang attribute to identify the language of the page	893
A	Word document contains a graphic without Alt Text.	41
A	Word document contains a non-inline graphic or	41



	object.	
Jumlah Halaman Dengan Issue Level A		1058
Level	Issues	Jumlah Halaman
AA	Ensure that text and background colors have enough contrast.	1
AA	e CSS outline or border style on this element makes it difficult or impossible to see the dotted link focus outline.	9
Jumlah Halaman Dengan Issue Level A		10
Level	Issues	Jumlah Halaman
AAA	Avoid specifying a new window as the target of a link with <code>target=_blank</code> .	886
AAA	Each section of content should begin with a heading element ( <code>h1</code> , <code>h2</code> , <code>h3</code> ), but this page has no headings.	11
AAA	Many people with cognitive disabilities (including dyslexia) find text styled with <code>text-align:justify</code> hard to read	3
AAA	veral links on a page share the same link text, but go to different destinations.	80
Jumlah Halaman Dengan Issues AAA		899

Secara lebih detail, pengujian indikator aksesibilitas menggunakan tiga tingkatan penilaian: level A, AA dan AAA. Level A adalah level yang mengindikasikan bahwa konten yang terdapat pada website tidak bisa diakses sama sekali oleh beberapa orang tertentu dan merupakan level terparah. Level AA adalah level tengah dimana sebagian informasi pada website sangat sulit untuk dimengerti dan halaman website sulit untuk digunakan. Dan terakhir level AAA yang mengindikasikan bahwa konten yang terkandung dalam website boleh jadi atau berpotensi untuk sulit digunakan dan dimengerti oleh pengguna. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 2 rincian dari permasalahan yang terdapat pada website covid19.kaltimprov.go.id beserta level permasalahan dan jumlah halamannya.

Dari rincian permasalahan yang terdapat pada indikator aksesibilitas dapat diketahui bahwa sebagian besar permasalahan aksesibilitas website covid19.kaltimprov.go.id masuk dalam level A atau level yang paling parah. Terdapat 26 jenis permasalahan level A pada 1058 halaman website, 2 permasalahan level AA pada 10 halaman dan 4 jenis permasalahan tingkat AAA pada 899 halaman. Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat tumpang tindih permasalahan pada halaman website covid19.kaltimprov.go.id dimana pada beberapa halaman terdapat lebih dari satu jenis permasalahan aksesibilitas.

Pada gilirannya permasalahan aksesibilitas ini akan mempengaruhi daya jangkau informasi kepada masyarakat. Terlebih jika mengingat kondisi dimana penyebaran misinformasi sangat massif dan menembus sampai wilayah terpencil di Kalimantan Timur, maka website resmi pemerintah merupakan medium yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan informasi valid terkait wabah covid-19 di Kalimantan Timur.

## Kesimpulan dan Rekomendasi

Pandemi covid-19 merupakan pandemi berskala global pertama yang terjadi di era kemajuan teknologi informasi. Di tengah-tengah kecanggihan teknologi informasi tersebut muncul ancaman besar yang berupa penyebaran misinformasi terkait pandemi. Pada gilirannya misinformasi tentang covid-19 bisa berpengaruh pada terhambatnya upaya pengendalian wabah penyakit dikarenakan adanya kepanikan masyarakat dan antipasti terhadap wabah ini akibat hoaks yang tersebar.

Untuk itu dibutuhkan suatu media yang bisa menyediakan informasi resmi dan valid terkait covid-19. Pemerintah Kalimantan Timur telah menyediakan suatu website bernama covid19.kaltimprov.go.id yang berfungsi sebagai kanal penyebaran informasi resmi tentang covid-19 di Kalimantan Timur. Namun untuk berfungsi sebagaimana yang diinginkan suatu website haruslah memiliki daya jangkau yang luas atau aksesibilitas yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat aksesibilitas covid19.kaltimprov.go.id melalui aplikasi SortSite 5.3.5.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan didapatkan data bahwa tingkat aksesibilitas covid19.kaltimprov.go.id tergolong bermasalah karena terdapat 85% permasalahan dengan tingkatan atau level yang beragam pada 1065 halaman website. Aksesibilitas yang bermasalah ini jika tidak segera ditangani dikhawatirkan bisa menghambat aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan informasi resmi terkait pandemi di Kalimantan Timur.

## Daftar Pustaka

- Aladwani, A. M. (2016). Corruption as a source of e-Government projects failure in developing countries: A theoretical exposition. *International Journal of Information Management*, 36(1), 105–112. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.10.005>
- Choi, H., Park, M. J., Rho, J. J., & Zo, H. (2014). Rethinking the assessment of e-government implementation in developing countries from the perspective of the design–reality gap: Applications in the Indonesian e-procurement system. *Telecommunications Policy*, 40(7), 644–660. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2016.03.002>
- Elkadi, H. (2013). Success and failure factors for e-government projects: A case from Egypt. *Egyptian Informatics Journal*, 14(2), 165–173. <https://doi.org/10.1016/j.eij.2013.06.002>
- Guijarro, L. (2007). Interoperability frameworks and enterprise architectures in e-government initiatives in Europe and the United States. *Government Information Quarterly*, 24(1), 89–101. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2006.05.003>
- Holzer, M., & Manoharan, A. P. (2016). Digital Governance in Municipalities Worldwide (2015-16) Seventh Global E-Governance Survey: A Longitudinal Assessment of Municipal Websites Throughout the World. In *Governance An International Journal Of Policy And Administration*. New Jersey: National Center for Public Performance.
- Ismail, A., & Kuppusamy, K. S. (2019). Web accessibility investigation and identification of major issues of higher education websites with statistical measures: A case study of college websites. *Journal of King Saud University* -

- Computer and Information Sciences, (xxxx).  
<https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2019.03.011>
- Karkin, N., & Janssen, M. (2014). Evaluating websites from a public value perspective: A review of Turkish local government websites. *International Journal of Information Management*, 34(3), 351–363.  
<https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2013.11.004>
- Kesswani, N., & Kumar, S. (2016). Accessibility analysis of websites of educational institutions. *Perspectives in Science*, 8, 210–212.  
<https://doi.org/10.1016/j.pisc.2016.04.031>
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Schuppan, T. (2009). E-Government in developing countries: Experiences from sub-Saharan Africa. *Government Information Quarterly*, 26(1), 118–127.  
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2008.01.006>
- United Nations. (2008). *United Nations e-Government Survey 2008: From e-Government to Connected Governance*. New York.
- Veeramootoo, N., Nunkoo, R., & Dwivedi, Y. K. (2018). What determines success of an e-government service? Validation of an integrative model of e-filing continuance usage. *Government Information Quarterly*, 35(2), 161–174.  
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.03.004>
- W3C. (2008). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0*. Retrieved October 25, 2020, from 2008 website: <https://www.w3.org/TR/WCAG20/>

